

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Amri (2017) tentang penghindaran pajak yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui signifikansi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak serta menguji pengaruh dari diversifikasi gender eksekutif dan persentase risiko eksekutif terhadap hubungan antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penemuan tersebut adalah data balanced panel berjumlah 404 tahun perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2012-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier. Hasil menunjukkan bahwa kompensasi akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan apabila diberikan kepada eksekutif yang memiliki diversifikasi gender yang ditunjukkan dengan setidaknya terdapat satu direksi wanita dan yang memiliki preferensi risiko *risk taker*.

Penelitian Dewi (2017) tentang *tax avoidance* yang memiliki tujuan untuk mencari pengaruh diversitas dewan komisaris dan direksi pada tindakan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan untuk penelitian tersebut yaitu 30 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI 2010-2014. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Selanjutnya, penggunaan variabel independen yaitu keberadaan anggota dewan komisaris dan direksi, proporsi komisaris independen dan variasi umur anggota dewan komisaris dan direksi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa umur anggota dewan direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Penelitian Putri dan Cahri (2017) tentang *tax avoidance* yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kelembagaan kepemilikan, kepemilikan manajerial dan komite audit tentang penghindaran pajak secara bersamaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya menggunakan variabel independennya yaitu *financial distress*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan komite audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Hijriani, dkk (2014) tentang penghindaran pajak yang memiliki tujuan untuk menguji dewan komisaris, koneksi politik dan karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu semua perusahaan BUMN dari berbagai sektor yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya menggunakan variabel independennya yaitu koneksi politik, jumlah rapat dewan komisaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Utami (2013) tentang *tax avoidance* yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh struktur *corporate governance*, *size* dan profitabilitas perusahaan terhadap *tax avoidance*. sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 90 perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Teknik analisis datanya menggunakan regresi berganda. Selanjutnya menggunakan variabel independennya yaitu komite audit, kualitas audit, latar belakang

pendidikan komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *size* perusahaan, profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Di dalam teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jansen dan Meckling (1976), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan dalam perusahaan dapat mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kemauannya sendiri, pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil kekurangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat- syarat yang disertai dalam hubungan tersebut (Warsidi & Pramuka, 2009). Adanya konflik keagenan antar pemerintah (*principal*) dengan perusahaan (*agent*) merupakan segala akibat dari tindakan manajer yang tidak dapat diawasi secara langsung oleh pemilik perusahaan. Untuk mencegah kemungkinan manajer melakukan penghindaran pajak maka diperlukan komposisi dewan direksi sebagai pihak pengawas.

Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal juga dapat mendorong timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya tersebut dapat berupa : pertama, pengeluaran untuk mengawasi agen (*monitoring expenditure*) pengeluaran yang terkait dengan fungsi pemantauan terhadap agen. Bentuk pemantauan yang sering dilakukan antara lain penyusunan laporan keuangan periodik untuk kepentingan pemilik (*stewardship accountability*) dengan adanya fungsi auditing yang bersifat independen dalam menyatakan pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan.

Kedua yaitu *bonding expenditure*, yaitu pengeluaran yang pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik. Ketiga, *residual loss*, merupakan pengorbanan yang berupa kekurangannya kemakmuran prinsipal sebagai akibat perbedaan praktek yang diambil oleh prinsipal dan praktek yang diambil agen (Warsidi & Pramuka, 2009)

### **2.2.2 Tax Avoidance**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola beban pajak secara legal. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik yang dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Christopher S et al., 2015).

*Tax planning* dibedakan menjadi *defensive tax planning*, yaitu *tax planning* yang dilakukan dengan tidak menggunakan ahli atau penasehat perpajakan dan dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Selanjutnya, *offensive tax planning* yang memakai tenaga ahli sebagai penasehat perpajakannya dan dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang masuk *kategori tax haven countries* (Christopher S et al., 2015).

Tindakan *tax avoidance* dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Ahmad, dkk. 2016). Selain *tax avoidance*, bentuk lain dari manajemen pajak adalah *tax evasion*, dimana yang dimaksud dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan (Kartikaningdyah & Putri, 2017). Sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Hartoto, 2018).

### **2.2.3 Dewan Direksi**

Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan sebagai pelaku pengelola perusahaan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Dewan direksi diduga mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan inovasi yang dimiliki dan pengambilan keputusan yang beragam berdasarkan karakteristik anggota dewan direksi yang berbeda-beda (Konvermann & Velte,

2019). Adapun karakteristik dewan direksi yang diambil untuk diteliti yaitu ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, keberadaan wanita dalam dewan direksi, jumlah rapat dewan direksi dan usia dewan direksi .

Ukuran dewan direksi adalah jumlah anggota dewan direksi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Dewan direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola segala sumberdaya yang ada dalam suatu perusahaan. Fungsi dewan direksi yaitu sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Semakin banyak adanya proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik hasil dari, Putri dan Chariri (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar total anggota dalam dewan direksi dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

Latar belakang dewan direksi adalah dewan direksi yang memiliki pendidikan sesuai dengan bidang pendidikan yang sudah ditempuh selama hidupnya (Astuti, 2017). Adanya pendidikan yang telah ditempuh oleh dewan direksi, maka dewan direksi dalam mengambil keputusan atau kebijakan didasari oleh pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Adanya latar belakang pendidikan yang dimiliki dewan direksi dapat membantu kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih baik sehingga dapat menjadikan tata kelola perusahaan menjadi baik juga.

Keberadaan wanita dalam dalam dewan direksi adalah proporsi wanita dalam dewan direksi (Kusumastuti & Perdana, 2007). Masih sedikitnya wanita yang ditempatkan di posisi puncak mungkin disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda tentang kesuksesan yang diraih oleh wanita dan pria. Kesuksesan pria dianggap karena memiliki kemampuan yang tinggi (dalam hal telaten atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih disebabkan karena keberuntungan. Namun disisi lain wanita memiliki ketelitian dan sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko dan lebih teliti dibandingkan pria hal ini dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak (Dewi, 2017).

Jumlah rapat dewan direksi adalah jumlah keseluruhan pertemuan formal yang dilakukan oleh anggota dewan direksi perusahaan, rapat dewan direksi berfungsi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola perusahaan. Rapat dewan diadakan pada waktu tertentu untuk mempertimbangkan isu-isu kebijakan dan masalah besar (Mughtar & Dariri, 2013). Didalam suatu perusahaan rapat dewan akan beroperasi secara rutin dalam menjalankan tugasnya, peran rapat dalam dewan perusahaan dilakukan untuk memecahkan masalah dan akan menjadi semakin penting apabila perusahaan mengalami krisis atau kepentingan pemegang saham berada dalam bahaya. Kualitas pengungkapan laporan keuangan yang baik akan memanfaatkan dengan baik dalam penghindaran pajak (Annisa & Kurniasih, 2012).

Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa Madya adalah 41 sampai 60

tahun, dewasa lanjut >60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Masa dewasa Madya adalah menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab, selain itu masa ini merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya. Hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama dimasa yang akan datang, para pekerja yang lebih tua memiliki kualitas positif pada pekerjaan mereka, khususnya pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat dan komitmen terhadap kualitas (Austin, 2017). Hasil penelitian Dewi (2017) menyatakan bahwa umur anggota dewan direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

## **2.3 Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Direksi Terhadap Penghindaran Pajak**

Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan sebagai pelaku pengelola perusahaan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Wewenang dari dewan direksi sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. keberadaan wanita dalam dewan sampai saat ini masih sedikit mungkin disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda tentang kesuksesan yang diraih oleh wanita dan pria. Kesuksesan pria dianggap karena memiliki kemampuan yang tinggi (dalam hal telaten atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih disebabkan karena keberuntungan.

Teori keagenan terdapat Konflik keagenan antara pemerintah (*principal*) dengan perusahaan (*agent*) merupakan akibat dari segala tindakan manajer yang tidak dapat diawasi langsung oleh pemilik perusahaan. Agar manajer tidak dapat

melakukan penghindaran pajak maka diperlukan komposisi dewan direksi sebagai pihak pengawas. Wanita memiliki ketelitian dan sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko dan lebih teliti dibandingkan pria. Hal ini dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga perusahaan dapat memanfaatkan penghindaran pajak (Dewi, 2017). Dari hasil penelitian Amri (2017) menunjukkan bahwa keberagaman gender dengan adanya paling tidak satu wanita dalam dewan direksi akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H1 : keberadaan wanita dalam dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **2.3.2 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak**

Latar belakang dewan direksi adalah dewan direksi yang memiliki pendidikan sesuai dengan bidang pendidikan yang sudah ditempuh selama hidupnya. Adanya latar belakang pendidikan yang dimiliki dewan direksi dapat meningkatkan efektifitas para dewan dalam melakukan pengawasan yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan untuk melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan penghindaran pajak (Astuti, 2017).

Konflik keagenan antara pemerintah (*principal*) dengan perusahaan (*agent*) merupakan akibat dari segala tindakan manajer yang tidak dapat diawasi langsung oleh pemilik perusahaan. Untuk mencegah kemungkinan manajer melakukan penghindaran pajak maka diperlukan komposisi dewan direksi sebagai pihak

pengawas. Pengetahuan dan pengalaman merupakan elemen yang signifikan untuk memastikan efektivitas dewan direksi. Adanya pendidikan yang telah ditempuh oleh dewan direksi, maka dewan direksi dalam mengambil keputusan atau kebijakan didasari oleh pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

## **H2 : Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.3.3 Pengaruh Usia Anggota Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak**

Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa Madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut >60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Masa dewasa Madya adalah menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab, selain itu masa ini merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya.

Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang menimbulkan konflik agensi dimana akibat dari segala tindakan manajer yang tidak dapat diawasi langsung oleh pemilik perusahaan. Untuk mencegah kemungkinan manajer melakukan penghindaran pajak maka diperlukan komposisi dewan direksi sebagai pihak pengawas. Hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama dimasa yang akan datang, para pekerja yang lebih tua memiliki kualitas positif pada pekerjaan mereka, khususnya pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat dan komitmen terhadap kualitas perusahaan, hal ini menyebabkan perusahaan dapat melakukan pertimbangan untuk melakukan penghindaran pajak (Austin, 2017).

Hasil penelitian (Dewi, 2017) menyatakan bahwa umur anggota dewan direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H3 : Usia Anggota Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak**

Jumlah rapat dewan direksi adalah jumlah keseluruhan pertemuan formal yang dilakukan oleh anggota dewan direksi perusahaan. Rapat dewan direksi berfungsi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola perusahaan (Muchtari & Dariri, 2013). Rapat dewan diadakan pada waktu tertentu untuk mempertimbangkan isu-isu kebijakan dan masalah besar.

Adanya Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang menimbulkan konflik agensi dimana akibat dari segala tindakan manajer yang tidak dapat diawasi langsung oleh pemilik perusahaan. Untuk mengatasi manajer agar tidak dapat melakukan penghindaran pajak maka diperlukan komposisi dewan direksi sebagai pihak pengawas.

Di dalam perusahaan rapat dewan akan beroperasi secara rutin dalam menjalankan tugasnya, peran rapat dalam dewan perusahaan dilakukan untuk memecahkan masalah dan akan menjadi semakin penting apabila perusahaan mengalami krisis atau kepentingan pemegang saham berada dalam bahaya. Kualitas pengungkapan laporan keuangan yang baik justru akan menghindari penghindaran pajak (Annisa & Kurniasih, 2012).

Hasil penelitian dari Hijriyani, dkk (2014) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, rapat dewan direksi merupakan jumlah rapat dewan direksi yang dilakukan pada periode tertentu. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H4 : Jumlah Rapat Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

**2.3.5 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak**

Dewan direksi sebagai pengawas dalam perusahaan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan . Terdapat banyak organisasi modern terhadap pemisahan antara kepemilikan dengan manajemen. Board *structure* yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat menjalankan tugasnya secara baik dan teratur sehingga tidak menimbulkan konflik diantara para dewan.

Dewan direksi yang terdapat dalam perusahaan bisa menjadi solusi adanya konflik keagenan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin banyak adanya proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (Mughtar & Dariri, 2013).

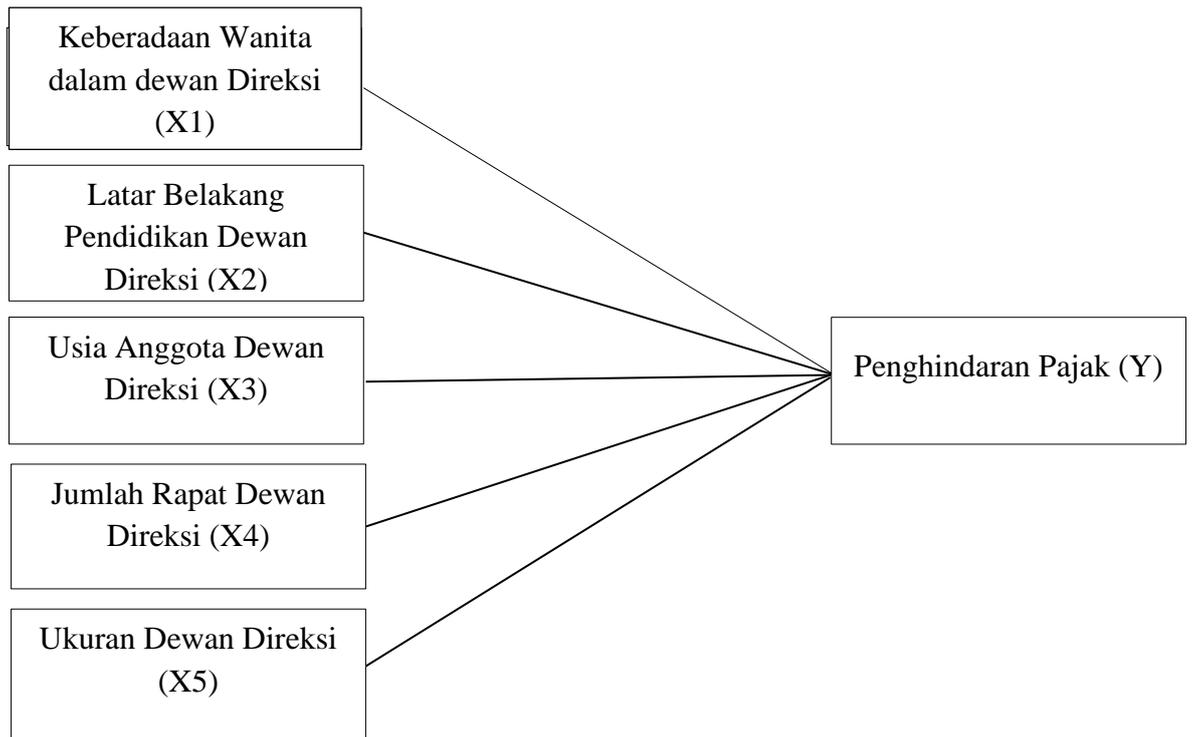
Hasil penelitian dari, Putri dan Chariri 2017 menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar total anggota dalam dewan direksi dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, ukuran dewan direksi dalam penelitian ini menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan pada

periode tertentu. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H5 : Ukuran Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

**2.4 Kerangka Pikir**

Berikut adalah gambar yang menunjukkan kerangka pikir dalam penelitian ini :



**Gambar 2.1. Model Penelitian**